



MEMBANGUN QARYAH THAYYIBAH: MASYARAKAT BERDAYA BEBAS RENTENIR PASCA PANDEMI COVID-19

Umrotul Khasanah¹, Mufidah Ch², Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono³, Harits Dijani Dzikhullah⁴, Nazwa Nur Amani⁵, Roiyyan Mohammad Moi⁶, Adz Dzikhroh Aliya Qurani⁷

1,2,3,4,5,6,7 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

INFO NASKAH

Diserahkan

11 Juli 2022

Diterima

12 Oktober 2023

Diterima dan Disetujui

17 Desember 2023

Kata Kunci:

Pemberdayaan Masyarakat, Covid-19, Participatory Action Research (PAR), Rentenir, Ekonomi Syariah

Keywords:

Community Empowerment, Covid-19, Participatory Action Research (PAR), Loan sharks, Sharia Economics

ABSTRAK

Penggunaan praktik peminjaman dari rentenir sering kali terkait dengan eksploitasi ekonomi, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan formal. Di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Kelurahan Merjosari, kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, praktik ini masih berlangsung dan bahkan semakin meningkat setelah terjadinya ketidakstabilan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan bimbingan kepada masyarakat agar dapat melepaskan diri dari praktik rentenir dan mengembalikan daya ekonomi mereka. Program ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya terjebak dalam utang rentenir berhasil mendirikan koperasi ekonomi yang berkelanjutan dengan prinsip ekonomi syariah. Tindak lanjut dari program ini melibatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, pelatihan kompetensi, pengembangan koperasi, dan sosialisasi literasi keuangan. Kegiatan ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan peran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan sehingga masyarakat dapat menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Abstract. Using lending practices from loan sharks is often associated with economic exploitation, especially among people with limited access to formal financial institutions. This practice is still ongoing in several areas in Indonesia, such as in Merjosari Village, Lowokwaru subdistrict, and Malang City. It is even increasing following the economic instability of the community after the Covid-19 pandemic. Therefore, this community service activity aims to guide the community so that they can free themselves from the practices of loan sharks and restore their economic power. This program uses the Participatory Action Research (PAR) method. The results of this service activity show that the empowerment program has a positive impact on increasing community income and welfare. Communities previously trapped in loan shark debt succeeded in establishing a sustainable economic cooperative based on Sharia economic principles. The follow-up to this program involves ongoing monitoring and evaluation activities, competency training, cooperative development, and financial literacy outreach. This activity also underlines the importance of active community participation and the role of government in supporting empowerment so that communities can become economically independent.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan umumnya dianggap sebagai suatu kondisi sementara yang tidak bersifat permanen (Sungkar, 2021). Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah bersama masyarakat mempunyai tanggung jawab penuh atas perubahan tersebut. Kemiskinan mencakup beberapa aspek misalnya ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Hal ini yang mengakibatkan bahwa kemiskinan menjadi suatu persoalan yang multidimensional (Aidha; et al., 2021; S Gopal et al., 2021). Dalam pandangan Islam, kemiskinan juga dianggap dapat diubah, seperti ketika seseorang yang awalnya masuk dalam kategori penerima zakat, kemudian dapat naik statusnya menjadi orang yang tidak memerlukan bantuan zakat, bahkan menjadi muzakki atau orang yang wajib membayar zakat (Khasanah, 2015; Soleman & Lestari, 2023).

Kemiskinan tidak hanya terbatas pada wilayah pedesaan, tetapi juga ada di masyarakat perkotaan (Rachman, 2019). Bahkan, kemiskinan di masyarakat perkotaan perlu diberdayakan agar tidak menimbulkan masalah sosial lainnya (Aidha; et al., 2021). Kota Malang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang tergolong kompleks dan universal, mengingat banyaknya sektor pendidikan dan pariwisata didalamnya (Nabawi, 2020). Studi tahun 2017 menyatakan bahwa ada beberapa masyarakat di wilayah kota Malang yang masih termasuk dalam masyarakat miskin (Sulhan & Sasongko, 2017).

Ada beberapa strategi untuk mengurangi tingkat kemiskinan, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan sekolah gratis atau pelatihan keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kehidupan mereka. Selain itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan juga dapat dicapai dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang memiliki kapasitas untuk menciptakan banyak lapangan kerja. Di Indonesia, UMKM mendominasi sebagian besar perekonomian, dengan lebih dari 99% kontribusi dalam ekonomi nasional. Peran utama UMKM yang terlihat jelas adalah kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat pengangguran (Anugerah & Nuraini, 2021; Rahayu, 2021).

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan bahkan dunia pada akhir 2019 menimbulkan banyak keresahan. Berbagai sektor terdampak negatif akibat pandemi tersebut. Pandemi Covid-19 telah memengaruhi beberapa sektor ekonomi, termasuk transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan, serta sektor lainnya. Namun, yang paling terdampak secara signifikan adalah sektor rumah tangga (Susilawati et al., 2020).

Seperti halnya permasalahan ekonomi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, di

kota Malang juga terdapat fenomena negatif yang disebabkan karena menurunnya kemampuan finansial masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Misalnya wilayah Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru Kota Malang. Wilayah ini berada di dekat kampus dan sebagian besar penduduknya merupakan pelaku UMKM. Sejak adanya pandemi Covid-19 ini, aktivitas mereka terhenti dan ini mengakibatkan ekonomi masyarakat sekitar menjadi melemah.

Pasca pandemi Covid-19 berakhir, aktivitas masyarakat sekitar mulai tumbuh kembali. Meskipun demikian, hal ini bukan tanpa masalah. Dana yang sebelumnya sudah banyak terpakai untuk kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi mengakibatkan masyarakat tidak memiliki dana yang cukup untuk memulai kembali aktivitas ekonomi mereka. Permasalahan menjadi semakin rumit, ketika masyarakat tidak mempunyai akses pada lembaga keuangan formal untuk melakukan peminjaman dana. Beberapa menyatakan bahwa peminjaman uang melalui lembaga formal memerlukan beberapa syarat yang mereka tidak dapat memenuhi. Sehingga masyarakat mengambil jalan pintas, yaitu dengan meminjam dana pada rentenir dengan bunga 30% hingga 50%.

Dengan memperhatikan situasi tersebut, tim pengabdian masyarakat merasa tertarik untuk mengeksplorasi perilaku masyarakat berpendapatan rendah di kota dan juga bagaimana aspek spiritual dalam kehidupan mereka memengaruhi usaha mereka dalam meningkatkan situasi ekonomi mereka serta menghindari keterlibatan dengan rentenir. Lebih lanjut, tim pengabdian berharap kegiatan ini memberikan manfaat sehingga dapat mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat binaan

2. METODE

Kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin untuk keluar dari jeratan rentenir ini dilaksanakan Kelurahan Merjosari, Lowokwaru, Malang. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research (PAR)*. Metode PAR merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Melalui metode PAR, pengabdian masyarakat tidak hanya selesai dengan melakukan sosialisasi, namun dilakukan dengan penelitian dan pendampingan, serta menghubungkan semuanya dalam proses perubahan sosial di masyarakat secara bersama-sama (Kemmis et al., 2014; Ozanne & Saatcioglu, 2008). PAR menjadi kombinasi pelibatan berbagai lini sosial yang didalamnya memuat kerja pendidikan, dan aksi politik dengan metodologi materialis historis (Baum et al., 2006).

Paradigma kegiatan pengabdian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan hal-hal yang sederhana dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Kemudian, konsep ini berkembang menjadi upaya yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dan pada akhirnya mencapai dampak yang luas di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, segala potensi yang ada dalam masyarakat seharusnya dimanfaatkan sebagai alat untuk menciptakan perubahan, baik itu berupa nilai-nilai agama, budaya, sumber daya manusia (dalam hal pengalaman hidup, kecerdasan, dan pengetahuan lokal), maupun sumber daya alam yang dimiliki oleh komunitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini secara alamiah menjadi sebuah proses transformasi dalam situasi sosial, mencakup berbagai aspek yang menciptakan perubahan positif.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan metode PAR ini meliputi tiga program yaitu menciptakan forum diskusi yang membahas pengaruh negatif dari sistem rentenir pada masyarakat binaan. Sistem rentenir juga sistem keuangan yang bertentangan dengan agama islam. Pembentukan grup arisan tanpa riba yang berfungsi sebagai jembatan pendanaan masyarakat binaan. Ketiga adalah adanya pendampingan secara langsung yaitu melalui pertemuan rutin dengan masyarakat binaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada tema pemberdayaan masyarakat miskin untuk mengakhiri ketergantungan pada rentenir merupakan sebuah pencapaian yang bernilai tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan komunitas yang rentan. Dalam masyarakat modern, masalah kemiskinan dan ketergantungan pada praktik rente telah menjadi salah satu tantangan sosial yang memprihatinkan. Oleh karena itu, melalui berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pengabdian ini, kami telah berkomitmen untuk menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat miskin, mengarahkan mereka menuju kebebasan finansial dan kemandirian ekonomi. Dalam paragraf berikutnya, kami akan membahas temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret bagi masyarakat miskin agar dapat terlepas dari jeratan rentenir dan memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan secara ekonomi.

Adapun Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi: 1) identifikasi masyarakat yang terjerat rentenir; 2) Pembentukan forum diskusi ekonomi; 3) Pengembangan program Ekonomi Syariah; 4) Terbentuknya lembaga nirlaba; 5) Peningkatan kesadaran

ekonomi dan 6) Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat binaan.

Tahapan identifikasi masyarakat yang terjerat hutang rentenir merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pemberdayaan. Melalui pengabdian masyarakat ini, upaya mendalam dalam mengenali dan memahami kelompok masyarakat yang terperangkap dalam praktik hutang rentenir. Identifikasi ini melibatkan survei yang cermat, wawancara, dan analisis data ekonomi sosial (Marliana et al., 2021). Peneliti mencoba mengidentifikasi keluarga dan individu-individu yang memiliki hutang hutang rentenir yang tinggi, yang sering kali menciptakan tekanan ekonomi dan sosial yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan kebutuhan mereka, kami dapat merancang strategi yang lebih efektif dan relevan untuk membantu mereka mengatasi masalah ini dan mengakhiri siklus ketergantungan pada rentenir. Selanjutnya, tim pengabdian akan menguraikan langkah-langkah selanjutnya dalam program pemberdayaan yang dirancang khusus untuk kelompok masyarakat yang telah diidentifikasi ini.

Pada tahapan berikutnya, yaitu pembentukan forum diskusi (Gambar 1). Tujuan dari forum diskusi adalah menciptakan platform atau wadah bagi berbagai individu atau kelompok untuk berbagi informasi, berbicara tentang isu-isu tertentu, memahami sudut pandang yang berbeda, memecahkan masalah, dan mempromosikan pertukaran ide serta pengetahuan. Forum diskusi sering digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya meningkatkan pengetahuan, pembahasan isu-isu kontempore, mendengarkan perspektif yang berbeda, pemecahan masalah, dan mempromosikan keterlibatan masyarakat (Fatmawati, 2019). Dalam tahapan ini, tim pengabdian mencoba membuka diskusi dengan beberapa masyarakat yang terjerat rentenir. Dari kegiatan tersebut, tim memperoleh kesimpulan bahwa alasan mereka melakukan kredit. Diantaranya adalah, mereka pada dasarnya ingin melanjutkan usaha kecilnya. Akan tetapi mereka terkendala keterbatasan dana dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan peminjaman di lembaga keuangan legal. Lebih lanjut, mereka menyampaikan bahwa para rentenir memberikan iming-iming dan syarat yang lebih mudah. Hal ini membuat masyarakat tergiur dan memutuskan untuk melakukan peminjaman pada rentenir.

Tahapan diskusi dilakukan beberapa kali. Pada diskusi selanjutnya, tim pengabdian mencoba menyampaikan beberapa informasi terkait pola pengembalian uang di rentenir yang cukup memberatkan serta hukumnya yang haram dalam islam. Dalam diskusi ini, tim pengabdian juga mensosialisasikan kegiatan Qoryah Toyibah yang berujung pada masyarakat yang islami dengan kemampuan finansial dan berbasis syariah (halal).

Salah satu kegiatan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan qoryah toyibah adalah dengan menciptakan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba dibentuk dari sekumpulan individu dengan tujuan yang sama. Lembaga ini termasuk dalam lembaga non-profit (Atufah et al., 2018). Organisasi nirlaba atau bisnis tanpa tujuan laba berorientasi pada melayani berbagai kelompok pihak yang berkepentingan, yang melibatkan anggota yang lebih banyak daripada pemegang saham. Pihak yang berkepentingan ini mencakup dewan pengawas, manajer, staf, pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, dan komunitas sekitar (Sartono, 2000). Dalam pembentukan lembaga nirlaba ini, tim pengabdian menyampaikan tujuan dari organisasi. Ide dan bantuan disampaikan untuk menciptakan lembaga ini dan memajukan anggotanya. Organisasi ini efektif dalam mengkoordinasikan inisiatif ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang menderita.

Kesadaran ekonomi dalam konteks usaha nirlaba sangat penting dalam mengelola sumber daya finansial dengan bijak dan efisien. Organisasi nirlaba mengenali bahwa meskipun tujuan utamanya adalah memberikan layanan atau manfaat bagi masyarakat atau tujuan amal, namun keberlanjutan finansial juga merupakan faktor kunci untuk mencapai misi mereka. Kesadaran ekonomi dalam usaha nirlaba melibatkan perencanaan keuangan yang cermat, pengelolaan sumber daya yang efisien, diversifikasi pendapatan melalui penggalangan dana, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang diterima dari berbagai sumber. Ini tidak hanya membantu memastikan kelangsungan usaha nirlaba, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat yang mereka layani. Dengan demikian, kesadaran ekonomi menjadi landasan penting dalam mencapai tujuan kemanusiaan dan sosial yang diemban oleh organisasi nirlaba.



Gambar 1. Forum Diskusi Tim Pengabdian dengan UMKM Binaan dalam Pengabdian Masyarakat Qaryah Thayyibah

Usaha nirlaba memiliki peran krusial dalam mendorong peningkatan UMKM sebagai bagian dari upaya untuk memajukan ekonomi yang inklusif. Melalui berbagai program dan inisiatifnya, organisasi nirlaba mampu memberikan dukungan berharga kepada UMKM, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan, akses ke sumber daya finansial, maupun promosi produk dan jasa UMKM tersebut. Selain itu, organisasi nirlaba sering berperan sebagai penghubung antara UMKM dan pihak-pihak yang lebih besar, seperti lembaga keuangan atau pasar yang lebih luas, membantu UMKM dalam mengembangkan jaringan dan peluang bisnis yang lebih luas. Dengan fokus pada peningkatan UMKM, usaha nirlaba mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan membantu komunitas lokal untuk mencapai keberlanjutan ekonomi yang lebih baik. Keseluruhan, usaha nirlaba memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan dan kemajuan UMKM, yang menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada tahapan ini, lembaga nirlaba terbukti memberikan dampak positif pada kemajuan UMKM anggotanya. Beberapa UMKM telah mendapatkan ilmu dan pendanaan sehingga dapat aktif kembali (Gambar 2).



Gambar 2. UMKM Binaan Pengabdian Qaryah Thayibah

4. SIMPULAN

Pada bagian ini, penulis menyampaikan dua topik besar, yaitu Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pengabdian dan Rekomendasi. RTL yang sustain dan komprehensif dapat membantu memastikan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Adapun RTL dalam kegiatan ini ini meliputi enam aspek. Pertama, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dengan melakukan survei dan evaluasi kepada masyarakat binaan dan memastikan adanya perubahan sikap masyarakat. Kedua, Peningkatan kompetensi, yaitu dengan memberikan penyuluhan tentang sistem ekonomi berbasis syariah dan pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan dana, pengembangan usaha dan peningkatan relasi. Ketiga, Pengembangan kelompok ekonomi berbasis syariah yaitu dengan menciptakan masyarakat binaan yang berdaya secara finansial dan sejahtera melalui kegiatan pengabdian Qaryah Thoyyibah. Keempat, Masyarakat binaan mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang legal dan tentunya berbasis syariah. Kelima, Sosialisasi manajemen keuangan melalui kegiatan peningkatan literasi keuangan dan resiko pembiayaan non-legal. Keenam adalah kerjasama dan sinergi dengan organisasi terkait. Kegiatan pembinaan masyarakat membutuhkan peran serta banyak pihak seperti lembaga keuangan, organisasi sosial dan tentunya pemerintah setempat.

Rekomendasi untuk program masa depan, berdasarkan kesuksesan program pemberdayaan saat ini, meliputi: pertama, perlu dilakukan penelitian menyeluruh mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan keuangan penduduk setempat sebelum melaksanakan program agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, pentingnya partisipasi aktif dan dukungan masyarakat dalam semua tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ketiga, program pemberdayaan harus bersifat berkelanjutan dengan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat untuk meningkatkan perekonomian dan menghindari rente. Keempat, masyarakat, terutama yang menjadi fokus pemberdayaan, harus terus menerima pelatihan dalam manajemen keuangan bisnis, prinsip syariah, dan koperasi. Kelima, peran pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, sangat penting dalam memberikan akses yang lebih mudah ke modal usaha, terutama bagi masyarakat terdampak Covid-19. Terakhir, sosialisasi literasi keuangan secara berkelanjutan harus dilakukan untuk membantu masyarakat memahami serta menghindari praktik rente dan riba. Dengan demikian, diharapkan program pemberdayaan masyarakat mampu memberikan dampak positif, membantu masyarakat miskin yang terjerat rentenir mengatasi masalah ekonomi, dan memungkinkan mereka mengelola keuangan secara mandiri dengan prinsip syariah, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi berkah untuk kehidupan keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidha;, C. N., Armintasari;, D. R. N. H. F., Sagala;, A. H. R. M., & Rahmanda Muhammad Thaariq; Widya Kartika. (2021). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015-2018. In *Prakarsa*.
- Anugerah, F. N., & Nuraini, I. (2021). Peran Umkm Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(1), 27–41. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i1.13772>
- Atufah, I. D., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). *Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah*. 2(3), 115–123.
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854–857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Fatmawati, S. (2019). Efektivitas Forum Diskusi Pada E-Learning Berbasis Moodle Untuk Meningkatkan Partisipasi Belajar. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(2). <https://doi.org/10.24176/re.v9i2.3379>
- Hafiz Nabawi. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Kota Malang. *Oeconomicus Journal Of Economics*, 4(2), 104–117.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). The action research planner: Doing critical participatory action research. In *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Khasanah, Y. (2015). Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BMT Muamalat Limpung. *Walisono Institutional Repository*, 1(c), 1–54.
- Marliana, E., Anisa, A., & Fauziyah, Nafilah, R. (2021). Optimalisasi Pendidikan Karakter melalui Workshop Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Yayasan Miftahul Falah Ashidiqiyyah Panumbangan. *PROCEEDINGS Uin Sunan Gunung Jati Bandung*, 01(21), 2 dari 15. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Ozanne, J. L., & Saatcioglu, B. (2008). Participatory action research. *Journal of Consumer Research*, 35(3), 423–439. <https://doi.org/10.1086/586911>
- Rachman, R. F. (2019). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam. *Komunitas*, 10(2), 157–176. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i2.1227>
- Rahayu, S. R. P. (2021). Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Jumlah UMKM Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7653>
- S Gopal, P., Abdul Rahman, M. A., Malek, N. M., Jamir Singh, P. S., & Chee Hong, L. (2021). Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(1), 40–51. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i1.608>
- Sartono, A. (2000). *Manajemen Keuangan*. BPF.
- Soleman, R., & Lestari, A. (2023). Produk Pemikiran Ekonomi Islam di Bidang Infaq dan Sadaqah sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan (Studi MUI dan Perundang-Undangan di Indonesia). *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(April), 16–29. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/3414%0Ahttps://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/download/3414/1558>
- Sulhan, M., & Sasongko, T. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 15–18.

- <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/365>
- Sungkar, S. (2021). Studi Kemiskinan di Negara Berkembang. *Dekonstruksi*, 5(01), 179–202. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v5i01.85>
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>
- Aidha;, C. N., Armintasari;, D. R. N. H. F., Sagala;, A. H. R. M., & Rahmanda Muhammad Thaariq; Widya Kartika. (2021). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015-2018. In *Prakarsa*.
- Anugerah, F. N., & Nuraini, I. (2021). Peran Umkm Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(1), 27–41. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i1.13772>
- Atufah, I. D., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. 2(3), 115–123.
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854–857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Fatmawati, S. (2019). Efektivitas Forum Diskusi Pada E-Learning Berbasis Moodle Untuk Meningkatkan Partisipasi Belajar. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(2). <https://doi.org/10.24176/re.v9i2.3379>
- Hafiz Nabawi. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Kota Malang. *Oeconomicus Journal Of Economics*, 4(2), 104–117.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). The action research planner: Doing critical participatory action research. In *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Khasanah, Y. (2015). Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BMT Muamalat Limpung. *Walisongo Institutional Repository*, 1(c), 1–54.
- Marliana, E., Anisa, A., & Fauziyah, Nafilah, R. (2021). Optimalisasi Pendidikan Karakter melalui Workshop Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Yayasan Miftahul Falah Ashidiqiyyah Panumbangan. *PROCEEDINGS Uin Sunan Gunung Jati Bandung*, 01(21), 2 dari 15. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Ozanne, J. L., & Saatcioglu, B. (2008). Participatory action research. *Journal of Consumer Research*, 35(3), 423–439. <https://doi.org/10.1086/586911>
- Rachman, R. F. (2019). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam. *Komunitas*, 10(2), 157–176. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i2.1227>
- Rahayu, S. R. P. (2021). Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Jumlah UMKM Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7653>
- S Gopal, P., Abdul Rahman, M. A., Malek, N. M., Jamir Singh, P. S., & Chee Hong, L. (2021). Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(1), 40–51. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i1.608>
- Sartono, A. (2000). *Manajemen Keuangan*. BPFÉ.
- Soleman, R., & Lestari, A. (2023). Produk Pemikiran Ekonomi Islam di Bidang Infaq dan Sadaqah sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan (Studi MUI dan Perundang-Undangan di Indonesia). *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(April), 16–29.

- <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/3414%0Ahttps://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/download/3414/1558>
- Sulhan, M., & Sasongko, T. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 15–18. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/365>
- Sungkar, S. (2021). Studi Kemiskinan di Negara Berkembang. *Dekonstruksi*, 5(01), 179–202. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v5i01.85>
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>